

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP
TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**
(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat)

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

ERSTELITA TRIA RAMADHANI DARWIS

2009/98604

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat
Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat
(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat)**

Oleh :
Erstelita Tria Ramadhani Darwis
98604/2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
Maret 2015 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, ... Februari 2015

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
Nip. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Navang Helmayunita, SE, M.Sc
Nip. 19860127 200812 2 001

PENGARUH BELANJA MODAL DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat)

Erstelita Tria Ramadhani Darwis
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : erstelitatriaramadhani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : (1) besarnya pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (2) besarnya pengaruh belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009-2013. Sampel pada penelitian ini berjumlah 19 kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) belanja modal (X_1) berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y), dimana nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari alpha 0,05 atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,903 > 1,986$ serta nilai β negatif. (2) belanja pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y), dimana nilai signifikansi 0,012 lebih kecil dari alpha 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,552 > 1,986$, nilai β negatif.

Bagi penelitian selanjutnya hendaknya menambah variabel lain yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci : Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

ABSTRACT

This study aimed to examine : (1) The influence of capital expenditure to the level of regional financial independence (2) the influence of employee expenditure to the level of regional financial independence.

This study classified the type of research that is causative. The population in this study was the district and the city of West Sumatra province in the year 2009-2013. The sample in this study amounted to 19 counties and cities of West Sumatra province. The selection of samples by purposive sampling method. The data used in this study are secondary data. Data collection techniques with documentation technique. The analysis used is multiple regression analysis using SPSS version 16.

The results showed that : (1) capital expenditures (X_1) significant negative influence on the level of regional financial independence (Y), in which the significance value of 0.005 is smaller than alpha of 0.05 or $t_{count} > t_{table}$ ie $2.903 > 1.986$ and negative β values. (2) employee expenditure significant negative influence on the level of regional financial independence (Y), where significant value of 0.012 is smaller than alpha 0.05 and $t_{count} > t_{table}$ is $2.552 > 1.986$, the value of β is negative.

For further research should add other variables that influence the level of regional financial independence.

Keywords : capital expenditures, employee expenditures and the level of Regional Financial Independence

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini membuat topik tentang kemandirian keuangan daerah dalam era otonomi semakin tertarik untuk dibahas, terlebih sejak di gulirkannya paket perundang-undangan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian kedua undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan, di arahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut diikuti dengan berbagai tuntutan masyarakat untuk dilakukannya reformasi di segala bidang, termasuk reformasi di bidang pemerintahan yang bersih dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Menurut Halim (2008:232), Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Halim (2008:232) juga menyatakan bahwa “kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh tiap Pemkab/Pemko dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman”.

Menurut Mulyanto (2007), belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Sedangkan Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Pemerintah daerah sudah seharusnya lebih memaksimalkan potensi daerahnya sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi dan pendapatan anggaran daerah lebih dialokasikan untuk kepentingan publik daripada kepentingan aparatur. Akan tetapi, faktanya dalam anggaran pendapatan dan belanja, porsi anggaran aparatur masih jauh lebih besar daripada anggaran untuk rakyat misalnya anggaran belanja modal, anggarannya lebih kecil daripada belanja pegawai.

Dengan kemandirian daerah, daerah diberi wewenang untuk menggali

sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya yang terdiri dari belanja operasi (rutin) dan belanja modal. Jika belanja modal naik maka kemandirian keuangan daerah juga akan naik karena belanja modal lebih besar dibiayai oleh pendapatan asli daerah maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri.

Masalah yang terjadi adalah masyarakat yang mengharapkan anggaran untuk perbaikan fasilitas umum seperti jalan, irigasi, jaringan dan belanja yang termasuk dalam komponen belanja modal seharusnya lebih besar, kenyataannya dalam data Kemendagri anggaran untuk belanja pegawai dalam bentuk gaji pegawai dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih besar. Apabila belanja modal semakin rendah maka peluang pembangunan dan perbaikan fasilitas umum daerah akan semakin kecil.

Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal (UU Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006).

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian pembangunan daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Hal ini tidak lepas dari peran serta para perangkat/pegawai pemerintah daerah

dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang banyak berkaitan dengan birokrasi pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik (*public service*).

Belanja pegawai untuk gaji dan honorarium Pemko Bukittinggi tahun anggaran 2014 dialokasikan Rp 324 miliar lebih atau 63% dari total belanja daerah. Sementara belanja modal yang bersentuhan dengan publik hanya dialokasikan sebesar Rp 46 miliar atau 9,03%. Kecilnya alokasi belanja modal ini jauh dari yang ditentukan Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang mengamanahkan belanja modal sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah (Sumber : Harian Umum Independen Singgalang).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian sejenis karena fenomena yang terjadi menunjukkan adanya perbedaan antara teori dan fakta dengan mengambil sampel Pemkab/Pemko pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat dengan judul **“Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (tahun 2009-2013).”**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sejauhmana Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Sejauhmana Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat ?

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Belanja

Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Untuk dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti mengenai pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- b) Bagi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai Belanja Modal dan Belanja Pegawai serta pengaruhnya terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
- c) Bagi calon peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian yang lebih lanjut yang berkaitan dengan Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

II. KAJIAN TEORI

1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi

serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah dalam Halim, 2007:23).

Menurut Halim (2007:25) Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari “keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Saragih (2003:12) Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD.

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2008:232), Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Adapun tujuan kemandirian keuangan daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan atau tidak. Menurut Widodo (dalam Halim, 2002) rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah kabupaten/kota ditekankan pada kemampuannya dalam membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya. Dimana pembiayaan itu diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah masing-masing. Maka menjadi suatu tugas yang sangat penting bagi masing-masing Pemkab/Pemko untuk menggali sumber keuangan daerahnya agar dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah yang maksimum guna menanggulangi semua aktivitas ataupun kegiatan pada setiap daerah, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. Menurut Halim (2008:232), rumus Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{bantuan Pemerintah Pusat (Provinsi Pinjaman)}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks pada Tabel 1 berikut ini (Mahsun, 2006:187).

Tabel 1
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan	Rasio	Pola
Rendah	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsulatif
Sedang	>50 -75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Mahsun, 2006.

- 1) Apabila hasil rasio kemandirian 0%-25%, berarti kemampuan daerah tersebut rendah sekali. Rasio

kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah sekali sangat bergantung kepada pemerintah pusat (pola hubungan instruktif).

- 2) Apabila hasil rasio kemandirian 25%-50%, berarti kemampuan daerah tersebut rendah. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah dalam hal keuangan sudah mulai berkurang campur tangan dari pemerintah. Sehingga, daerah tersebut dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan konsulatif).
- 3) Apabila hasil rasio kemandirian 50%-75%, berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah sedang dianggap mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan partisipatif).

Apabila hasil rasio kemandirian 75%-100%, berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah tinggi maka campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu melaksanakan otonomi (pola hubungan delegatif).

3. Belanja Modal

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa karakteristik yang terkandung dalam pengertian belanja modal yaitu :

- 1) Pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun
- 2) Dapat menambah kekayaan (aset) daerah
- 3) Implikasi dari pengeluaran ini akan menambah anggaran belanja rutin berupa biaya operasi dan pemeliharaan
- 4) Pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi
- 5) Dalam tahun anggaran tertentu

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan alokasi belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Belanja Modal digunakan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan masa manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan.

4. Belanja Pegawai

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/lembaga, Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk dalam

kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi. Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan (tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan/yang dipersembahkan dengan tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi kerja, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, dan tunjangan umum) baik dalam bentuk uang maupun barang.

Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian Saprudin (2011) yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Upaya Pajak (*Tax Effort*), Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Pegawai Terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah di Kabupaten Indramayu Periode 1998-2008. Hasil penelitian menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah sedangkan Upaya Pajak tidak mempengaruhi Kemandirian Pembangunan Daerah.

Penelitian oleh Ika Lusiana Darsono (2013) mengenai Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa pada tahun 2011 adalah positif dan signifikan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kurnia Rina Ariani (2010) mengenai Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan *Tax Effort* pada Kabupaten/Kota Surakarta. Hasil

penelitiannya menunjukkan Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum juga berpengaruh terhadap *Tax Effort*.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini akan menghubungkan antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu belanja modal dan belanja pegawai serta satu variabel terikat yaitu kemandirian daerah. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dari penelitian ini adalah :

Gambar 1 Kerangka Konseptual

III. HIPOTESIS PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kausatif. Penelitian kausatif merupakan penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, di samping mengukur kekuatan hubungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

2. Populasi dan Sampel

Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004:73). Populasi dalam penelitian ini adalah 19 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2004:73). Metode pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2004:78).

3. Jenis dan Sumber data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data dokumenter. Data Dokumenter, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dan data tersebut sudah diolah seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2009 s/d Tahun Anggaran 2013.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber-sumber lainnya. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD dari tahun 2009-2013.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat

adalah kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

Adapun tujuan kemandirian daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan atau tidak. Kemandirian daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Menurut Halim (2008:232) pengukuran rasio kemandirian:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{bantuan Pemerintah Pusat (Provinsi Pinjaman)}} \times 100\%$$

Variabel Bebas (X)

Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel bebas/dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah :

Belanja Modal (X₁)

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

$$\text{Persentase BM} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}}$$

Belanja Pegawai (X₂)

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Menurut DJPK pengukuran belanja pegawai adalah :

$$\text{Persentase BP} = \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Belanja Daerah}}$$

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah teknik regresi berganda untuk menguji pengaruh pendapatan belanja modal belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik akan dilakukan sebelum menguji hipotesis seperti yang telah dikembangkan dalam bab sebelumnya. Beberapa uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a) Uji Normalitas Residual

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen atau keudanya terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov* (KS) dengan kriteria pengujian $\alpha = 0,05$ dimana :

- (a) Jika $\text{sig} \geq \alpha$ berarti residual terdistribusi normal
- (b) Jika $\text{sig} \leq \alpha$ berarti residual tidak terdistribusi normal.

b) Uji Multikolinieritas

Menurut Idris (2006) multikolinieritas merupakan suatu gejala korelasi antar variabel independen yang ditunjukkan dengan korelasi signifikan antar variabel independen. Adanya gejala multikolinieritas dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas *tolerance value* adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10. Apabila *tolerance value* < 0,1 atau VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas. Sebaliknya apabila *tolerance value* > 0,1 atau VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

c) Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pengujian ada tidaknya autokorelasi, menggunakan uji *Durbin-Watson*.

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari adanya

autokorelasi, Ghozali (2009). Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak ada korelasi antar data berdasarkan urutan waktu. Metode yang digunakan adalah *Durbin Watson*.

Kriteria pengujiannya sebagai berikut :

- (a) Angka DW di bawah -2 maka terjadi autokorelasi positif
- (b) Angka DW di antara -2 sampai dengan +2 maka tidak ada autokorelasi
- (c) Angka DW di atas +2 maka terjadi autokorelasi negatif

d) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *Glejser*. Apabila $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2007), model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

7. Metode dan Teknik Analisis Data

Metode Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda, karena menyangkut dua variabel independen dan satu variabel dependen. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formula sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Kemandirian Keuangan Daerah
- A = Konstanta
- X₁ = Belanja Modal (BM)
- X₂ = Belanja Pegawai (BP)
- b₁ = koefisien regresi BM
- b₂ = koefisien regresi BP
- e = pengganggu (*error*)

Pengujian Hipotesis

a) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) intinya mengukur tingkat ketepatan dari regresi linear berganda yaitu persentase sumbangan (*goodness of fit*) dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square* karena variabel bebas yang digunakan lebih dari satu. Tujuan pengukuran *Adjusted R Square* adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

b) Uji Signifikansi (Uji – F)

Uji F ini dilakukan untuk menguji secara serentak variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $\text{sig} < 0,05$, menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $\text{sig} > 0,05$, menunjukkan bahwa model yang digunakan belum mampu menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) 0,05.

c) Uji Parsial (Uji – t)

Uji t ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan. Hal ini diperoleh dengan rumus :

$$t = \frac{\beta_n}{S\beta_n}$$

Keterangan :

B_n = Koefisien regresi masing-masing variabel

Sβ_n = Standar error dari masing-masing variabel

8. Definisi Operasional

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas/independen (X) dan variabel terikat/dependen (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel

Belanja Modal (X_1) dan Belanja Pegawai (X_2). Variabel terikatnya adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) adalah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat maka daerah tersebut belum bisa dikatakan mandiri. Adapun tujuan kemandirian keuangan daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. Dalam belanja ini termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya.

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau

Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Sumatera Barat berpenduduk sebanyak 4.846.909 jiwa dengan mayoritas beretnis Minangkabau yang seluruhnya beragama Islam. Provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten (kecuali kabupaten Kepulauan Mentawai) dinamakan sebagai nagari.

Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi ini memiliki dataran seluas 42.297,30 km² yang setara dengan 2,17% luas Indonesia. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17% merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 2.420.357 km dengan luas perairan laut 186.580 km². Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudera Hindia termasuk dalam provinsi ini.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi, yaitu antara 22,6°C sampai 31,5°C. Provinsi ini juga dilalui oleh Garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman. Di provinsi ini berhulu sejumlah sungai besar yang bermuara ke pantai timur Sumatera seperti Batang Hari, Siak, Inderagiri (disebut sebagai Batang Kuantan di bagian hulunya), dan Kampar. Sementara sungai-sungai yang bermuara ke pesisir barat adalah Batang Anai, Batang Arau, dan Batang Tarusan.

Terdapat 29 gunung yang tersebar di 7 kabupaten dan kota di Sumatera Barat,

dengan Gunung Kerinci di kabupaten Solok Selatan sebagai gunung tertinggi, yang mencapai ketinggian 3.085 m. Selain Gunung Kerinci, Sumatera Barat juga memiliki gunung aktif lainnya, seperti Gunung Marapi, Gunung Tandikat, dan Gunung Talang. Selain gunung, Sumatera Barat juga memiliki banyak danau. Danau terluas adalah Singkarak di kabupaten Solok dan kabupaten Tanah Datar, disusul Maninjau di kabupaten Agam. Dengan luas mencapai 130,1 km², Singkarak juga menjadi danau terluas kedua di Sumatera dan kesebelas di Indonesia. Danau lainnya terdapat di kabupaten Solok yaitu Danau Talang dan Danau Kembar (julukan dari Danau Diatas dan Danau Dibawah).

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan Semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia. Oleh karenanya, wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Gempa bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini di Sumatera Barat di antaranya adalah Gempa bumi 30 September 2009 dan Gempa bumi Kepulauan Mentawai 2010.

2. Statistik Deskriptif

Sebelum variabel penelitian dianalisis dengan melakukan pengujian rumus statistik, data dari masing-masing variabel penelitian dideskripsikan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang diteliti. Data penelitian yang menjadi variabel dependen (Y) yaitu Kemandirian Daerah, sedangkan yang menjadi variabel independen adalah Belanja Modal (X_1), dan Belanja Pegawai (X_2).

Tabel 5 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (Lampiran)

Dari tabel 5 terlihat bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 95 data selama rentang tahun

penelitian tahun 2009-2013. Variabel terikat yaitu kemandirian keuangan daerah memiliki rata-rata sebesar 7,9827 dengan standar deviasi 3,78296. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat adalah masuk dalam kategori sangat rendah. Rata-rata daerah di Sumatera Barat masih sangat menggantungkan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Variabel belanja modal diprosikan memiliki rata-rata sebesar 0,1894 dengan standar deviasi 0,06508. Persentase belanja modal tertinggi (maksimum) adalah 0,36, sedangkan presentase belanja modal terendah (minimum) adalah 0,06.

Variabel belanja pegawai memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5256 dengan standar deviasi sebesar 0,10570. Persentase belanja pegawai tertinggi (maksimum) terjadi pada angka 0,71 dan persentase belanja pegawai terendah (minimum) pada angka 0,24.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan apabila penelitian menggunakan metode regresi berganda. Data yang akan diolah dengan regresi berganda dibantu dengan SPSS. Uji asumsi klasik perlu dilakukan agar didapatkan parameter yang valid dan handal. Pengujian asumsi klasik ini terdiri atas :

a) Uji Normalitas Residual

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika tingkat signifikansinya $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Jika tingkat signifikansinya $< 0,05$ maka data dikatakan tidak berdistribusi normal. Secara rinci hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas (Lampiran)

Dari Tabel 6 terlihat bahwa hasil uji menyatakan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,163 dengan signifikansi 0,134. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal, karena nilai signifikansi dari uji normalitas untuk masing-masing variabel lebih besar dari α ($\alpha = 0,05$) yaitu $0,134 > 0,05$.

b) Uji Multikolinearitas

Tabel 7

Hasil Uji Multikolinearitas (Lampiran)

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat dilihat hasil perhitungan nilai *VIF* dan *Tolerance*. Nilai *VIF* untuk variabel belanja modal (X_1) sebesar 2,973 dengan *tolerance* 0,336. *VIF* untuk variabel belanja pegawai (X_2) sebesar 2,973 dengan *tolerance* sebesar 0,336. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan *Variance Inflation Factor (VIF)* kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar semua variabel bebas yang terdapat dalam penelitian.

c) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Lampiran)

Dalam uji ini, apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada Tabel 7 dapat dilihat nilai sig . 0,511 untuk variabel belanja modal, 0,139 untuk variabel belanja pegawai. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini.

d) Autokorelasi

Tabel 8

Hasil Uji Autokorelasi (Lampiran)

Dari tabel 8 didapatkan nilai *Durbin-Watson (DW hitung)* sebesar 1,655. Berdasarkan kriteria yang telah

ditentukan *DW* hitung berada diantara -2 dan 2, yakni $-2 \leq 1,655 \leq 2$ maka ini berarti tidak terjadi autokorelasi. Sehingga kesimpulannya adalah Uji Autokorelasi terpenuhi.

4. Model Regresi Berganda

Model regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara variabel bebas dan variabel terikat. Analisis regresi berganda dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Berikut hasil olahan regresi yang diperoleh :

Dari pengolahan data statistik di atas maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 21,734 - 29,022 (X_1) - 15,708 (X_2) + e$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a) Konstanta (α)

Nilai konstanta yang diperoleh 21,734. Hal ini berarti jika variabel independen (X_1 dan X_2) tidak ada atau bernilai nol, maka besarnya tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 21,734.

b) Koefisien Regresi (β)

Nilai koefisien regresi variabel belanja modal (X_1) sebesar 29,022. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan proporsi belanja modal akan mengakibatkan penurunan banyaknya tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 29,022. Nilai koefisien regresi variabel belanja pegawai (X_2) sebesar 15,708. Hal ini menandakan, setiap kenaikan satu satuan belanja pegawai akan mengakibatkan penurunan banyaknya tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 15,708.

5. Uji Kelayakan Model

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²) (Lampiran)

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* yang diperoleh sebesar 0,065. Ini berarti bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2013 dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya yaitu belanja modal dan belanja pegawai sebesar 6,5%, sisanya 93,5% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

b) Uji F-Statistik

Tabel 11

Hasil Uji F (Lampiran)

Hasil pengolahan data menunjukkan hasil sebesar 4,267 yang signifikan pada 0,017. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ (sig. 0,017 < 0,05). Hal ini berarti bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah *fix*.

c) Uji Hipotesis (Uji *t*)

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada Tabel 9, maka dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut :

1) Hipotesis 1 (Semakin tinggi belanja modal maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin besar)

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa nilai koefisien β proporsi belanja modal bernilai negatif sebesar 29,022 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,903 > 1,986, dengan signifikansi 0,005 < 0,05. Hal ini berarti bahwa belanja modal berpengaruh dan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. **Dengan demikian hipotesis pertama (H₁) diterima.**

2) Hipotesis 2 (Semakin tinggi belanja pegawai maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin kecil)

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa nilai koefisien β proporsi belanja pegawai bernilai negatif sebesar 15,708 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,552 > 1,986, dengan signifikansi 0,012 < 0,05. Hal ini berarti bahwa belanja pegawai berpengaruh dan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. **Dengan demikian hipotesis kedua (H₂) diterima.**

6. Pembahasan

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil olah data statistik dapat dilihat bahwa belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,903 > 1,986, dengan nilai signifikansi 0,005 < 0,05 dan juga dapat dilihat β sebesar 29,022 dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal (X₁) berpengaruh dan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dengan demikian H₁ diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Darsono (2013) menyatakan bahwa alokasi belanja modal dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa pada tahun 2011 adalah positif dan signifikan. Ariani (2010) juga menyatakan hal yang sama bahwa hasil penelitian berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan positif dari variabel independen belanja modal dan pengaruh signifikan negatif dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pada penelitian ini hampir sama, hanya saja di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat berpengaruh signifikan negatif. Belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, tetapi belanja modal yang terjadi masih kurang merata atau rendah sehingga

banyak ketimpangan tingkat kemandirian keuangan antar daerah.

Dengan kemandirian daerah, daerah diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya yang terdiri dari belanja operasi (rutin) dan belanja modal. Jika belanja modal naik maka kemandirian keuangan daerah juga akan naik karena belanja modal lebih besar dibiayai oleh pendapatan asli daerah maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri.

Keberadaan anggaran belanja modal yang bersumber dari bantuan pusat dan pendapatan asli daerah, yang apabila dibandingkan dengan investasi swasta mempunyai nilai yang relatif kecil, namun belanja modal tersebut mempunyai peranan strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Silitonga (2009) yang menyatakan bahwa hasil data dan pengujian hipotesis tingkat kemandirian keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja modal daerah tampak pada nilai koefisien determinasi sebesar 0,001 jauh dibawah 0,05 pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil olah data statistik dapat dilihat bahwa belanja pegawai berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan nilai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,552 > 1,986$, dengan nilai signifikansi $0,012 < 0,05$ dan juga dapat dilihat β sebesar 15,708 dengan arah negatif. Hal ini berarti bahwa belanja pegawai berpengaruh dan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian

keuangan daerah, dengan demikian H_2 diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Saprudin (2011) yang menyatakan bahwa belanja pegawai secara statistik signifikan mempengaruhi kemandirian pembangunan daerah kabupaten Indramayu dan memiliki arah koefisien yang negatif. Hal ini disebabkan karena alokasi belanja dalam struktur APBD kabupaten Indramayu cenderung lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin, sehingga mengurangi kemandirian pembangunan daerah.

Kemandirian daerah dapat tercapai apabila sistem dalam tatanan pemerintahan berjalan dengan baik, salah satu diantaranya adalah kinerja para perangkat daerah. Belanja pegawai berperan sebagai alat kompensasi yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan juga sebagai pendorong untuk meningkatkan produktifitas kerja para perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Arah koefisien yang negatif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi belanja pegawai akan menyebabkan kemandirian pembangunan daerah akan semakin rendah. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai disatu sisi memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian daerah, dimana besarnya belanja pegawai bisa mendorong produktifitas kinerja para perangkat daerah tersebut. Namun di sisi lain, belanja pegawai juga dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap kemandirian daerah, hal ini dikarenakan besarnya belanja pegawai akan mempengaruhi besarnya

tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas keuangan daerah.

Pada penelitian ini proporsi belanja pegawai cenderung meningkat. Pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah cenderung lebih besar digunakan untuk belanja pegawai daripada digunakan untuk belanja pembangunan. Belanja pegawai mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas keuangan daerah. Hal tersebut dapat menghambat laju pembangunan daerah sehingga harapan untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah akan sulit tercapai.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2013. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Belanja modal berpengaruh dan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009-2013. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) diterima.
2. Belanja pegawai berpengaruh dan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009-2013. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) diterima.

2. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini :

1. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel belanja modal dan variabel belanja pegawai dengan tingkat *Adjusted R²* yang

rendah dari modal yang diuji 0,065 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. Penelitian atau data observasi yang digunakan hanya pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, sehingga tingkat generalisasi hasil penelitian masih terbatas.

3. Saran

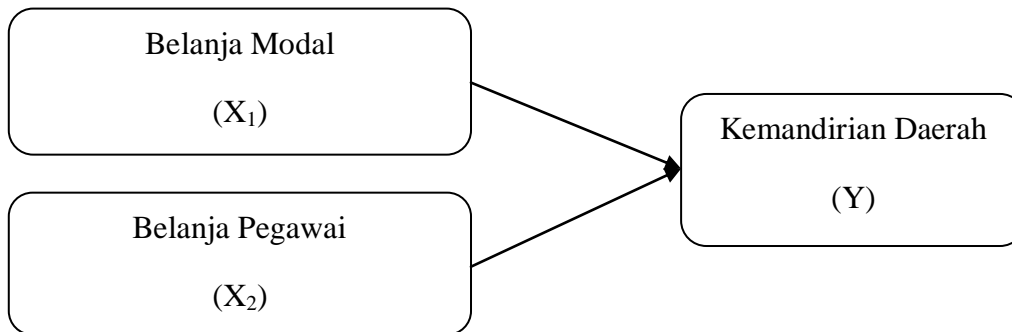
Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya juga menambah beberapa variabel dari belanja daerah lainnya atau faktor-faktor politik yang mungkin juga mempengaruhi penelitian ini agar lebih mengetahui yang menyebabkan terjadinya kemandirian keuangan daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas sampel dalam menguji kemandirian keuangan daerah penelitian karena memperluas sampel penelitian memungkinkan akan memperlihatkan faktor penyebab terjadinya kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten dan kota.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah data observasi diluar kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat sehingga dapat meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. "*Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*". Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Ersyad, Muhammad. 2011. "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat*

- Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)*”, Skripsi, FE UNP, Padang.
- Halim, Abdul Jamal Abdul Nasir. 2007. “Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang”, *Jurnal Manajemen Usahawan*, Nomor 06 Th XXXV Juni 2006, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta, hal. 42.
- Harian Umum Independen Singgalang. “Belanja Pegawai lebih besar dari Belanja Publik”. 30 Oktober 2014. <http://belanjapegawailebihbesaridari belanjapublik/HarianSinggalang.html>.
- <http://www://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen>
- <http://news.luwukpost.info/2014/01/02/wajib-30-persen-belanja-modal.html>
- <http://www.rmol.co/read/2013/01/07/93019/10-Daerah-Terbebani-Belanja-Pegawai-Tinggi->
- <http://www://sumbar.bps.go.id>
- Ismi Rizky dan Suryo. 2009. *Pengaruh PAD dan Belanja Pembangunan terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi*. Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II.
- Mardiasmo, 2002. “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi. Sondi Putra, Iswahyudi & Rahmawati, Maulidah. 2009. “*Akuntansi Pemerintahan*”, Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Priyatno, Duwi. 2014. “SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis”, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Rina Ariani, Kurnia. 2010. “*Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)*”, Skripsi, FE USMS, Surakarta.
- Saprudin. 2011. “*Analisis Pengaruh Upaya Pajak (Tax Effort), Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah di Kabupaten Indramayu Periode 1998-2008*”, Skripsi, FE Unpas, Bandung.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. “*Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*”, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiono, Suhandarini. “*Pengaruh Moderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Hubungan Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah*”, Skripsi, FE UNS, Surabaya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Yani, Ahmad, 2008. “*Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Variabel Independen**Variabel Dependen**

Gambar 1
Kerangka Konseptual

Tabel 1
Sampel Penelitian

No.	Nama Kabupaten dan Kota
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2	Kabupaten Pesisir Selatan
3	Kabupaten Solok
4	Kabupaten Sijunjung
5	Kabupaten Tanah Datar
6	Kabupaten Padang Pariaman
7	Kabupaten Agam
8	Kabupaten Lima Puluh Kota
9	Kabupaten Pasaman
10	Kabupaten Solok Selatan
11	Kabupaten Dharmasraya
12	Kabupaten Pasaman Barat
13	Kota Padang
14	Kota Solok
15	Kota Sawah Lunto
16	Kota Padang Panjang
17	Kota Bukittinggi
18	Kota Payakumbuh
19	Kota Pariaman

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Tabulasi Data Penelitian

1. Variabel Y (Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah)

Kabupaten dan Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Kepulauan Mentawai	8,61	8,11	10,11	8,69	5,73
Kabupaten Pesisir Selatan	3,27	3,23	4,89	5,66	5,79
Kabupaten Solok	4,51	3,98	5,09	4,44	4,30
Kabupaten Sijunjung.	7,67	6,33	10,13	7,13	6,30
Kabupaten Tanah Datar	7,94	8,04	10,32	9,11	9,97
Kabupaten Padang Pariaman	4,60	5,03	4,81	4,83	5,33
Kabupaten Agam	5,25	4,46	7,04	5,96	6,02
Kabupaten Lima Puluh Kota	2,33	3,58	4,45	4,00	4,05
Kabupaten Pasaman	4,06	4,18	6,05	6,65	5,85
Kabupaten Solok Selatan	4,00	2,44	4,44	5,70	6,40
Kabupaten Dharmasraya	7,87	13,36	9,50	9,38	8,27
Kabupaten Pasaman Barat	5,86	5,65	5,64	5,99	6,82
Kota Padang	15,46	15,75	17,01	18,14	20,42
Kota Solok	9,12	7,65	8,86	7,18	8,99
Kota Sawah Lunto	10,38	9,93	13,28	11,80	11,26
Kota Padang Panjang	9,02	10,08	10,43	10,49	10,78
Kota Bukittinggi	13,31	12,11	13,82	12,32	13,29
Kota Payakumbuh	11,20	13,21	14,96	13,69	12,37
Kota Pariaman	4,28	5,37	5,56	5,00	3,82
Maximum					20,42
Minimum					2,33
Average					7,99

2. Variabel X₁ (Belanja Modal)

Kabupaten dan Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Kepulauan Mentawai	0,26	0,22	0,27	0,30	0,34
Kabupaten Pesisir Selatan	0,15	0,18	0,17	0,15	0,17
Kabupaten Solok	0,10	0,10	0,14	0,18	0,17
Kabupaten Sijunjung	0,22	0,27	0,24	0,19	0,25
Kabupaten Tanah Datar	0,14	0,06	0,12	0,12	0,16
Kabupaten Padangpariaman	0,15	0,12	0,16	0,16	0,15
Kabupaten Agam	0,16	0,07	0,11	0,10	0,17
Kabupaten Lima Puluh Kota	0,14	0,13	0,15	0,15	0,19
Kabupaten Pasaman	0,16	0,09	0,18	0,18	0,25
Kabupaten Solok Selatan	0,36	0,24	0,28	0,30	0,34

Kabupaten Dharmasraya	0,33	0,25	0,24	0,27	0,29
Kabupaten Pasaman Barat	0,26	0,21	0,16	0,23	0,23
Kota Padang	0,10	0,12	0,12	0,16	0,19
Kota Solok	0,29	0,16	0,17	0,26	0,17
Kota Sawah Lunto	0,15	0,18	0,20	0,18	0,16
Kota Padang Panjang	0,23	0,25	0,19	0,13	0,20
Kota Bukittinggi	0,19	0,13	0,12	0,11	0,18
Kota Payakumbuh	0,17	0,17	0,12	0,14	0,16
Kota Pariaman	0,27	0,25	0,29	0,20	0,25
Maximum					0,36
Minimum					0,06
Average					0,19

3. Variabel X₂ (Belanja Pegawai)

Kabupaten dan Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Kepulauan Mentawai	0,26	0,28	0,32	0,28	0,24
Kabupaten Pesisir Selatan	0,56	0,57	0,60	0,61	0,57
Kabupaten Solok	0,61	0,68	0,62	0,61	0,63
Kabupaten Sijunjung	0,42	0,46	0,49	0,53	0,49
Kabupaten Tanah Datar	0,58	0,71	0,66	0,69	0,60
Kabupaten Padangpariaman	0,55	0,60	0,66	0,64	0,65
Kabupaten Agam	0,60	0,70	0,68	0,70	0,61
Kabupaten Lima Puluh Kota	0,57	0,68	0,63	0,63	0,62
Kabupaten Pasaman	0,51	0,63	0,56	0,58	0,48
Kabupaten Solok Selatan	0,31	0,48	0,45	0,42	0,40
Kabupaten Dharmasraya	0,36	0,47	0,46	0,47	0,44
Kabupaten Pasaman Barat	0,42	0,52	0,53	0,50	0,50
Kota Padang	0,60	0,65	0,65	0,64	0,61
Kota Solok	0,41	0,46	0,47	0,48	0,48
Kota Sawah Lunto	0,44	0,55	0,47	0,49	0,46
Kota Padang Panjang	0,40	0,41	0,46	0,49	0,43
Kota Bukittinggi	0,52	0,58	0,59	0,61	0,51
Kota Payakumbuh	0,46	0,46	0,59	0,55	0,53
Kota Pariaman	0,44	0,46	0,46	0,57	0,47
Maximum					0,71
Minimum					0,24
Average					0,53

Hasil Analisis Regresi Berganda

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	95	2.33	20.40	7.9827	3.78296
X1	95	.06	.36	.1894	.06508
X2	95	.24	.71	.5256	.10570
Valid N (listwise)	95				

2. Hasil Uji Normalitas

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.61883778
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.119
	Negative	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		1.163
Asymp. Sig. (2-tailed)		.134

a. Test distribution is Normal.

Regression

Variables Entered/Removed ^b			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

3. Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	21.734	4.916		4.421	.000		
	X1	-29.022	9.995	-.499	-2.903	.005	.336	2.973
	X2	-15.708	6.155	-.439	-2.552	.012	.336	2.973

a. Dependent Variable: Y

4. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.291 ^a	.085	.065	3.65796	1.655

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

5. Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.734	4.916		4.421	.000
	X1	-29.022	9.995	-.499	-2.903	.005
	X2	-15.708	6.155	-.439	-2.552	.012

a. Dependent Variable: Y

6. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.291 ^a	.085	.065	3.65796

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

7. Uji F Statistik

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	114.192	2	57.096	4.267	.017 ^a
Residual	1231.023	92	13.381		
Total	1345.215	94			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

8. Uji Heterokedastisitas

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: abres

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.348 ^a	.121	.102	2.15684

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: abres

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	58.939	2	29.470	6.335	.003 ^a
Residual	427.980	92	4.652		
Total	486.919	94			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: abres

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.692	2.898		.239	.812
X1	-3.891	5.894	-.111	-.660	.511
X2	5.410	3.629	.251	1.491	.139

a. Dependent Variable: abres